WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);

14. Peraturan. . .

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Permasalahan. . .

8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Renstra. . .

(2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

e. BAB V PENUTUP

(3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 637

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 67 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam lima tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang mengandung tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan berpedoman kepada Dokumen RPJMD 2025-2029 Kota Batam, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya mengakselerasikan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tetap berhaluan kepada pencapaian kesejahteraan keluarga yang unggul dan berkarakter khususnya melalui peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Renstra ini disusun secara partisipatif dan integrative dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang melibatkan semua pihak baik secara internal maupun eksternal yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk lima tahun kedepan dapat dicapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Batam, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana Kota Batam

Novi Harmadyastuti, S.Sos, M.M
NIP. 19761128 200212 2 006

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR GRAFIK vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1
1.2.Landasan Hukum 5
1.3.Maksud dan Tujuan 7
1.4.Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 47

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50

3.1. Tujuan 50
3.2. Sasaran 50
3.3. Strategi 58
3.4. Arah Kebijakan 62

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN 67

4.1. Uraian Program 67
4.2. Uraian Kegiatan 68
4.3. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan 101
4.4. Penyelenggara Kinerja Urusan 175

BAB V PENUTUP 183
5.1. Pedoman Transisi 183
5.2. Kaidah Pelaksanaan 184

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan 29
Tabel 2. 2 Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan 30
Tabel 2. 3 Data Kendaraan Dinas P3AP2KB Tahun 2025..... 30
Tabel 2. 4 Data Sarana dan Prasarana Dinas P3AP2KB Kota Batam Tahun 2025... 30
Tabel 2. 5 Data Inventaris Barang Dinas P3AP2KB Kota Batam Tahun 2025 31
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Batam 33
Tabel 2. 7 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas P3AP2KB Kota Batam..... 45
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 56
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2029 59
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 62
Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 64
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 70
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 101
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 176
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 180
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci 181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB 4

Gambar 1. 2 Tahapan dan Sistematika Renstra Dinas P3AP2KB 5

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB 12

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Dinas P3AP2KB 52

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas P3AP2KB 53

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegitan Renstra Perangkat Daerah 68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Target dan Capaian IPG Kota Batam Tahun 2021-2024.....36
Grafik 2. 2 Target da Capaian IDG Kta Batam Tahun 2021-2024 37
Grafik 2. 3 Data Kekerasan Perempuan dan Anak 41

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Batam tahun 2025-2029.

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah **"*Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata*"** Sedangkan misi pembangunan kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemerataan pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kota Batam sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2024, merupakan leading sektor program/kegiatan

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Batam yang terkait dalam pencapaian misi 3 rencana pembangunan kota Batam yaitu "Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berdaya Saing, Produktif dan Berakhlak Mulia".

Maka dalam rangka menjabarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ke dalam lingkup kerja Perangkat Daerah perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kota Batam.

Proses penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan tentang mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah/Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu strategis, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas P3AP2KB Kota Batam.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan prioritas kerja sesuai Analisa SWOT
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
4. Mendorong Peningkatan dan Pemberdayaan SDM
5. Peningkatan Kualitas layanan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Strategi tersebut diturunkan ke dalam bentuk kebijakan, serta program dan kegiatan yang terencana dan terstruktur.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terjadi pergeseran wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah termasuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perempuan sebagai ibu generasi penerus Bangsa Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan merupakan isu strategis dan penting dalam mengusahakan kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menggali potensi dan kreatifitas perempuan Indonesia khususnya perempuan Kota Batam dalam upaya mensejahterakan keluarga.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB

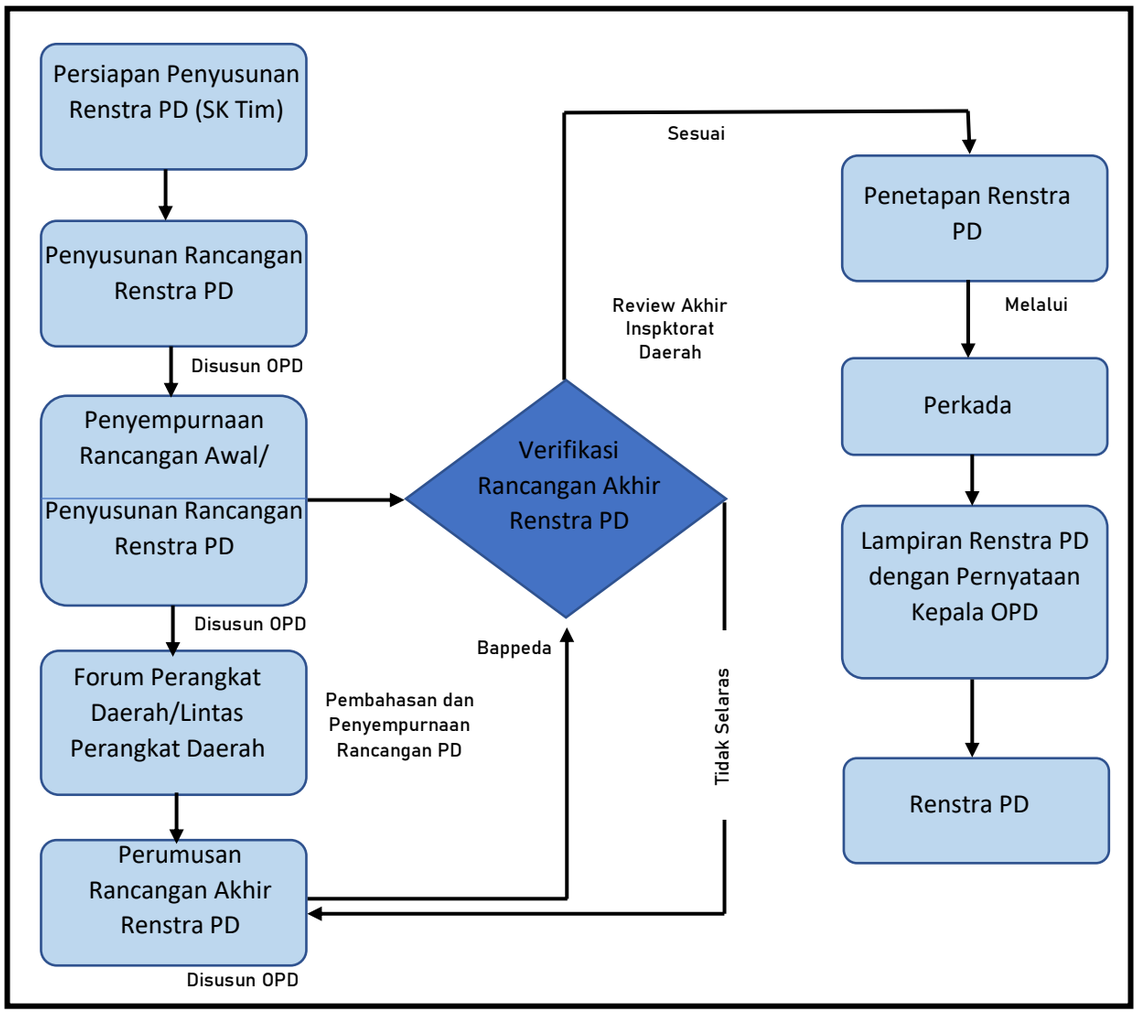

Gambar 1. 2 Tahapan dan Sistematika Renstra Dinas P3AP2KB

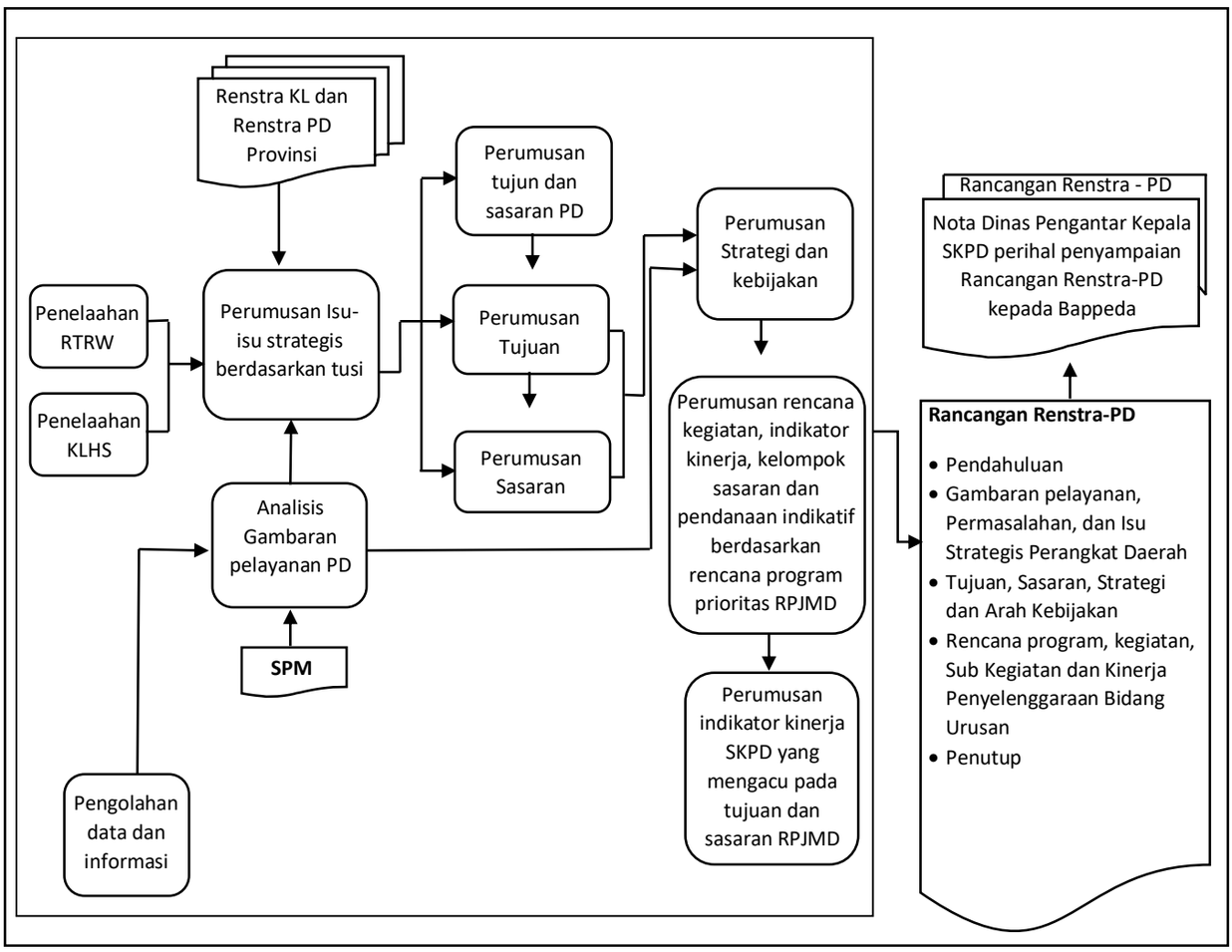

Renstra perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat mendasar dan strategis sebagai implikasi langsung terhadap penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra perangkat daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tantang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadu Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Sekretariat Negara : 20 Halaman);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Batam. Selain itu, untuk merumuskan rangkaian program maupun kegiatan Dinas P3AP2KB Kota Batam sesuai dengan tugas maupun fungsinya dan sebagai dokumen perencanaan Dinas P3AP2KB Kota Batam selama kurun waktu 2025-2029. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai landasan/ pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan menjadi pedoman dalam melaksanakan program maupun kegiatan

Dinas P3AP2KB Kota Batam sehingga mempunyai arah yang jelas selama periode 5 (lima) tahun.

b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan Dinas P3AP2KB Kota Batam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.
c. Sebagai acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Batam dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
d. Sebagai acuan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas P3AP2KB Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam, fungsi Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam, keterkaitan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam dengan RPJMD Kota dan Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas P3AP2KB Kota Batam, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas P3AP2KB Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas P3AP2KB Kota Batam, serta uraian tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Batam. Uraian tentang struktur organisasi ditunjukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas P3AP2KB Kota Batam, sumber daya Dinas P3AP2KB, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Dinas P3AP2KB Kota Batam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penjelasan mengenai metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam serta peluang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai keterkaitan visi, misi Pemerintah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029, perumusan tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. yang disusun berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Batam 2025-2029.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Rumusan Tujuan dan Sasaran strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai arah penentuan Tujuan Sasaran Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Rumusan Tujuan dan Sasaran strategis yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB Kota Batam dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

dan penyelenggaraan bidang urusan.

4.1 Uraian Program

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

4.2 Uraian Kegiatan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

4.3. Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan

Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, pendanaan beserta indikator keluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas P3AP2KB Kota Batam yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas P3AP2KB Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Batam Nomor 31 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas P3AP2KB. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat.
   a. Sekretaris
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
   a. Kepala Bidang
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
   a. Kepala Bidang
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
   a. Kepala Bidang
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakan
   a. Kepala Bidang
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga
   a. Kepala Bidang;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Secara rinci struktur organsiasi terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB

2.1.1. Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Derah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, Kedudukan Dinas P3AP2KB Kota Batam sebagaimana uraian sebagai berikut:

a. Dinas P3AP2KB mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas P3AP2KB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas P3AP2KB menjalankan fungsi yaitu:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;

c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pemenuhan hak anak, bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas P3AP2KB Kota Batam membawahi:

a. Sekretariat;
b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2.1.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangannya.

(1) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
   a. menetapkan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, bidang kualitas hidup Perempuan, bidang pemenuhan haka nak, bidang perlindungan khusu anak, bidang

pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga brencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;

c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancer;
d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward* and *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
g. Melaporkan akuntabilitas kinerja Dinas dan menetapkan laporan kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerha, Informasi Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Lingkungan Dinas;
i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
k. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analis Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di Lingkup Dinas;
l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;

m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada bawahan;
o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan;
p. mengusulkan/menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas;
q. menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Daerah;
r. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
s. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup Perempuan, bidang pemenuhan haka nak, bidang perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretatis Daerah;
t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
d. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;
e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
f. menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;
g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi: Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja Dinas Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Dinas;
k. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
l. mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan kompetisi inovasi pelayanan public lingkup Dinas;
m. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
n. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;
o. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjut dari pimpinan;

p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
q. mengoordinasikan penyiapan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
r. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi pada Dinas;
s. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian, perumusan kebijakan dan penyusunan rencana Pembangunan pada Dinas secara teratur dan sistematis termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan;
t. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang meliputi tata Kelola dan tata laksana, pengelolaan infrastruktur, dan system terkait data dan informasi serta multimedia lingkup Dinas;
u. mengoordinasaikan pengelolaaan dan kegiatan perumusan, analisis, evaluasi dan penyusunan saran kebijakan organisasi dan sumber daya aparatur professional mutkhir serta penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian;
v. mengoordinasikan pelaksanaan, analisis dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
w. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah Dinas;
x. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
y. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
z. elakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
aa. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
bb. melakasanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undang.

2.1.1.3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan. Uraian tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan sebagai berikut:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang kualitas hidup perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang kualitas Perempuan;
d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e. mengorrdinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan pengarustamaan gender;
f. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan pengarusutamaan gender pada lemabga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
g. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
h. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender;
i. mengoordinasikan perumusan standarisasi Lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender;
j. mengoordinasikan penyusunan standarisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
k. mengoordinasikan penghimpunan, pengolahan dan Analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pengarusutamaan gender;
l. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi;
m. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;

n. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasai dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
o. mengoordinasikan pengutan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi;
p. mengoordinasikan perusuman standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
q. mengoordinasikan penyusunan standarisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
r. mengoordinasaikan penghimpuanan, pengolahan dan Analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
s. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
t. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
u. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
v. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
w. mengoordinasikan perumusan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
x. mengoordinasikan penyusunan standardisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
y. mengoordinasikan penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
z. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan lingkup pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
aa. mengoordinasian pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi infomasi;

bb. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang meliputi tata kelola dan tata laksana, pengelolaan infrasturktur dan sistem terkait data dan informasi serta multimedia lingkup Bidang;
cc. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
dd. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
ee. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
ff. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan; dan
gg. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak. Uraian tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak;
d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemenuhan hak anak;
f. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;

g. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemenuhan hak anak;
h. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak;
i. mengoordinasikan perumusan standardisasi lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak,
j. mengoordinasikan penyusunan standardisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak;
k. mengoordinasikan penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pemenuhan hak anak;
l. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan peningkatan kualitas hidup anak;
m. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan peningkatan kualitas hidup anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
n. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak;
o. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
p. mengoordinasikan perumusan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
q. mengoordinasikan penyusunan standardisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak;
r. mengoordinasikan penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan peningkatan kualitas hidup anak;
s. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
t. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha,
u. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak,
v. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
w. mengoordinasikan perumusan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

x. mengoordinasikan penyusunan standardisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
y. mengoordinasikan penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak,
z. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
aa. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi infomasi;
bb. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang meliputi tata kelola dan tata laksana, pengelolaan infrasturktur dan sistem terkait data dan informasi serta multimedia lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
cc. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
dd. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak.
ee. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
ff. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak Anak.
gg. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Kusus Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Uraian tugas bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sebagai berikut:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja terhadap perlindungan perempuan dan anak bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
f. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
g. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
h. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
i. mengoordinasikan perumusan standardisasi lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
j. mengoordinasikan penyusunan standardisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebij akan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
k. mengoordinasikan penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
l. mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan kelembagaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
m. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kesiapan kelembagaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
n. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

o. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
p. mengoordinasikan perumusan standardisasi lembaga penyedia layanan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
q. mengoordinasikan penyusunan standardisasi pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
r. mengoordinasikan penghimpunan,pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
s. mengoordinasikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
t. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
u. mengoordinasikan rancangan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
v. mengoordinasikan perumusan standardisasi penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
w. mengoordinasikan penyusunan standardisasi pembentukan forum koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,
x. mengoordinasikan penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
y. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebij akan lingkup perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

z. mengoordinasian pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi infomasi;
aa. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang meliputi tata kelola dan tata laksana, pengelolaan infrasturktur dan sistem terkait data dan informasi serta multimedia lingkup Bidang,
bb. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
cc. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
dd. melaksanaan koordinasi terhadap informasi data perempuan dan anak serta data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
ee. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; dan
ff. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai berikut:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;.
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
e. mengoordinasikan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebij akan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
f. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah,.

g. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB;.
h. mengoordinasikan pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB;
i. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
j. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;.
k. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan lingkup pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan;
l. mengoordinasian pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi infomasi;
m. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang meliputi tata kelola dan tata laksana, pengelolaan infrasturktur dan sistem terkait data dan informasi serta multimedia lingkup Bidang;
n. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
o. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
p. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.7. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Uraian tugas keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
j. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Daerah;
k. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
l. mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan.
m. mengoordinasikan pendayagunaan dan pembinaan tenaga penyuluh KB serta peningkatan kerjasama kemitraan,
n. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dibidang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha guna peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
o. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dibidang ketahanan keluarga melalui kelompok bina keluarga;
p. mengoordinasikan proses pembentukan danpembinaan kelompok Pusat Informasi dan Konseling remaja melalui program generasi berencana;
q. mengoordinasikan proses Pembentukan dan pembinaan satuan karya Keluarga Berencana, pusat pelayanan keluarga sejahtera, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
r. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh keluarga berencana ditingkat lini lapangan;

s. mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional, kompilasi, dokumentasi serta penyebarluasan data dan informasi berupa hasil evaluasi dan analisa program yang disebarkan kepada instansi pengguna data;
t. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan keluarga, laporan klinik KB, laporan pengendalian lapangan secara berkala;
u. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
v. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan;
w. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan lingkup pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
x. mengoordinasian pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi infomasi pada Bidang;
y. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang meliputi tata kelola dan tata laksana, pengelolaan infrasturktur dan sistem terkait data dan informasi serta multimedia lingkup Bidang;
z. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
aa. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
bb. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
cc. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; dan
dd. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas P3AP2KB Kota Batam

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya perangkat daerah pada Dinas P3AP2KB Kota Batam meliputi sumberdaya aparatur perangkat daerah dan sarana prasarana (aset) yang menjadi penunjang kerja Dinas P3AP2KB Kota Batam.

Berdasarkan data status kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) kota Batam untuk tahun 2025, total jumlah pegawai adalah 63 orang. Komposisi status kepegawaian menunjukkan dominasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 47 orang dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 16 orang. Dan secara umum jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yakni 49 orang pegawai perempuan dan 14 orang pegawai laki-laki.

Adapun Uraian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan jenis pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	5	4	9
2.	Fungsional	-	-	9	-	9
3.	Staf	-	2	25	2	29
5.	PPPK	-	-	-	-	16
6.	THL	-	-	-	-	-
Jumlah		-	2	39	6	
Jumlah						63

Sumber Data : Data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Tahun 2025

Diagram 2.1

Data ASN Dinas P3AP2KB Tahun 2025

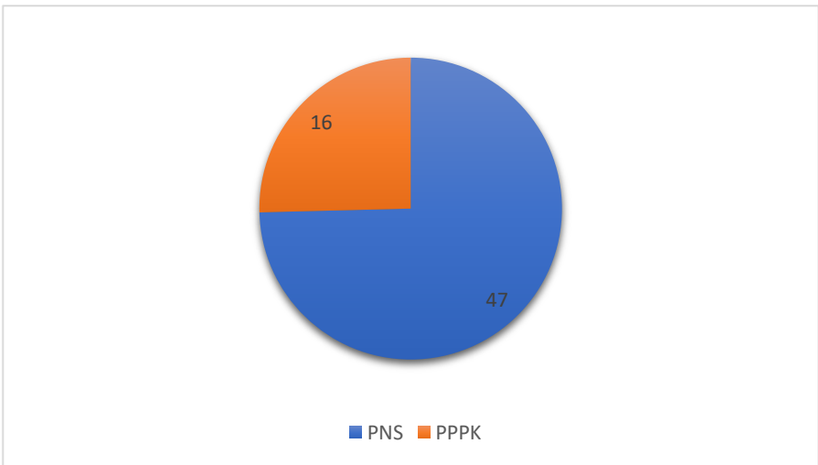

Tabel 2. 2 Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian		Menurut Pendidikan				Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Struktural	-	-	-	5	4	9
2.	Fungsional	-	-	-	9	-	9
3.	Staf	-	3	7	16	3	29
5.	PPPK	-	2	1	13	-	16
6.	THL	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	5	8	43	7	63

Sumber Data : Data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Tahun 2025

2. Sarana dan prasarana

Dinas P3AP2KB saat ini telah memiliki aset/modal sebagai sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas P3AP2KB, dirangkum dalam tabel inventaris di bawah ini:

Tabel 2. 3 Data Kendaraan Dinas P3AP2KB Tahun 2025

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Mobil	7	6	1	-
2	Motor	3	3	-	1

Tabel 2. 4 Data Sarana dan Prasarana Dinas P3AP2KB Kota Batam Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas
1	Tanah	Bidang	1
2	Gedung dan Bangunan	Unit	18
3	Alat Angkut (kendaraan Roda 4 dan 2)	Unit	10
4	Alat Studio dan Komunikasi	Unit	4
5	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	252
6	Alat Kedokteran	Únit	1
7	Alat Laboratorium	Unit	-

Tabel 2. 5 Data Inventaris Barang Dinas P3AP2KB Kota Batam Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Lemari sorok	2	Baik
2	Filling cabinet	12	Baik
3	Brangkas	1	Baik
4	Lemari kaca	2	Baik
5	Papan nama instansi	5	Baik
6	Tempat tidur besi	5	Baik
7	Meja rapat	3	Baik
8	Meja receptionis	2	Baik
9	Sofa	3	Baik
10	AC split	22	Baik
11	PC unit	29	Baik
12	Laptop	8	Baik
13	Printer	33	Baik
14	Meja kerja pejabat	11	Baik
15	Kursi kerja pejabat	15	Baik
16	Kursi kerja pegawai	7	Baik
17	Lemari buku arsip	11	Baik
18	Camera electronic	1	Baik
19	Layar film / projector	5	Baik
20	Note book	15	Baik
21	Lemari kayu	3	Baik
22	Kursi tamu	1	Baik
23	Televisi	2	Baik
24	Vacum Cleaner	1	Baik
25	Wirelless	2	Baik
26	Meja panjang	3	Baik
27	Home use	2	Baik
28	Meja 1/2 biro	1	Baik
29	Partisi	2	Baik
30	Mesin absensi	3	Baik
31	Lemari penyimpan	2	Baik
32	Lemari es	1	Baik
33	Mesin cuci	1	Baik
34	Overhead Projector	4	Baik
35	Alat kedokteran / Thermogun	1	Baik
36	White board	1	Baik
37	Bangku tunggu	3	Baik
38	Lemari besi	2	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
39	Rak besi	2	Baik

2.1.3.Kinerja Pelayanan Dinas P3P2AKB Kota Batam

Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB dapat dilihat melalui tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Dinas P3AP2KB pada periode tahun 2021-2026 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator kinerja lainnya.

Tabel 2.6 Evaluasi Capaian kinerja Dinas P3AP2KB menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga dapat dilihat tingkat perolehan capaian kinerja Dinas P3AP2KB melalui selisih antara target dan realisasi yang diperoleh.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Batam

No	Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKP	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		94.43	94.44	94.46	94.48	94.50	94.51	94.75	94.95	95.72		100.085	100.328	100.519	101.31	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		58.40	58.45	58.50	58.55	58.60	58.38	58.65	58.26	61.31		99.9658	100.342	99.5897	104.31	
3	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak		5%	5.5%	6%	6.5%	7%	26%	+4.41%	+23.2%	+52%		371.429	tidak tercapai	tidak tercapai	tidak tercapai	
4	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)		2.38	2.36	2.34	2.32	2.30	2.16	2.16	2.16	2.14		110.185	109.259	108.333	108.41	
5	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga		57.22	57.24	57.26	57.28	57.30	55.99	55.99	59.76	67.26		97.8504	97.8162	104.366	117.42	
6	Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
7	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota		11.3	11.3	11.3	11.4	11.5	16.01	13.87	10.40	11.9		141.68	122.74	92.04	104.39	

No	Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKP	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Perempuan	Batam																
8	Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%		100.00	100.00	100.00	100.00	
9	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam		4.00	4.30	4.50	4.75	5.00	4.00	4.33	7.77	4.49		100.00	100.70	172.67	94.53	
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG		60%	65%	70 %	75 %	80 %	60%	70%	100%	100%		100.00	107.69	142.86	133.33	
11	Pemenuhan Hak Anak	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak		750	770	780	800	820	670	770	950	953.01		89.33	100.00	121.79	119.13	
12	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%		100.00	100.00	100.00	100.00	
13	Pengendalian Penduduk	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK		30%	30%	40 %	50 %	60 %	30%	34%	40%	50%		100.00	113.33	100.00	100.00	

No	Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKP	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
14	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate)		80%	80.50 %	81 %	82 %	83 %	78.70 %	80.30 %	82.18 %	81.58 %		98.38	99.75	101.46	99.49	
15	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif		40%	45%	50 %	55 %	60 %	40%	45%	50%	60%		100.00	100.00	100.00	109.09	

2.1.3.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2021-2025

Dari Tabel 2.3.1. dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2025, dari 15 indikator kinerja, terdapat 8(delapan) indikator kinerja yang sudah mencapai angka realisasi melebihi target atau diatas 100%, 4 (tiga)Indikator yang tercapai sesuai target tahunan/RPJMD, 3 (tiga) indikator yang capaian nya rata-rata diatas 90% dan 1(satu) capaian indikator yang tidak mencapai target.

8 (Delapan) Indikator melebihi target tersebut adalah :

1. Indeks Pembangunan Gender, sebagai Indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan realiasi capaian 95.72 dengan Persentase nilai 101.31 %.

Gambaran secara umum tentang pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender jika dilihat dari proyeksi ketercapaian sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik melebihi target yang akan dicapai, dengan nilai IPG yang cenderung meningkat dan mendekati angka 100 mengindikasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sudah terlaksana dengan baik. Adapun tiga dimensi utama dalam mengukur kesetaraan gender ini adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standard hidup layak.

Grafik 2. 1 Target dan Capaian IPG Kota Batam Tahun 2021-2024

Sumber Data : BPS Kota Batam menggunakan data SPLF 2010

2. Indeks Pemberdayaan Gender, realisasi 61.31 dan Persentase nilai 104.31%

Indeks Pemberdayaan Gender dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung meningkat namun pada tahun 2023 menurun pada

angka capain 58.26 dari target 58.50 dan pada tahun 2024 tercapai pada angka 61.31 dari target 58.55, hal ini mengindikasikan ketercapaian melalui 3 dimensi substansi IDG yakni : Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sudah tercapai lebih baik, namun dari ketiga Komponen ini yang masih belum memenuhi standart IDG adalah Ketewakilan Perempuan dalam Parlemen di kota Batam yang masih mencapai angka 10% dari target yang diharapkan sebesar 30%

Grafik 2. 2 Target da Capaian IDG Kta Batam Tahun 2021-2024

Sumber Data : BPS Kota Batam menggunakan data SPLF 2010

3. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) dengan realisasi capaian 2.14 dan Persentase nilai 108.41%

   Faktor Pendorong ketercapaian TFR Kota Batam pada angka 2.14 tidak terlepas dari peran aktif Dinas P3AP2KB Kota Batam dalam melaksanakan edukasi perencanaan keluarga sehingga bersumbangsih dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui proyeksi angka kelahiran di kota Batam. Permasalahan dan isu yang perlu diperhatikan pada masa kini terletak pada fundamental pembangunan generasi berencana pada remaja kota Batam dalam pendewasaan usia perkawinan, edukasi kesehatan reproduksi dan edukasi positif ddalam pemanfaatan akeses teknologi terhadap tumbuh kembang remaja masa kini.
4. Indeks Pembangunan Keluarga dengan realisasi capaian 67.26 % dan Persentase nilai 117.42%

   Pencapaian indeks Pembangunan keluarga berkorelasi erat dengan

Pembinaan terhadap Kelompok Ketahanan Keluarga Kota Batam yang tercakup dalam BKB,BKR, PIK-R, BKL dan UPPKA. Program Pembangunan Keluarga berupaya meningkatkan kesadaran dan sumbangsih masyarakat kota Batam dalam membangun keluarga yang tahan terhadap tantangan globalisasi ekonomi dan teknologi. Indeks Pembangunan Keluarga terkoreksi dari 3 fundamen pilar pembangunan Keluarga yakni : Indeks Ketentraman (59.76, Indeks kemandirian (54.09) dan indeks Kebahagiaan (65.29).

5. Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam dengan realisasi capaian 11.93 % dan Persentase nilai 104.39%

   Faktor Pendorong pelaksanaan ARG Kota Batam yang berpengaruh pada pencapaian ARG adalah sebagai berikut :

   - Pendampingan PPRG mulai dari penyusunan Renja OPD bersama dengan OPD Pembina (Bappeda, DP3AP2KB, Inspektorat, BPKAD)
   - Sudah tersusun pedoman PPRG
   - Adanya kerjasama dengan akademisi/lembaga social untuk penyelenggaraan pelatihan PPRG, Pendampingan PPRG oleh OPD Pembina

6. Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG dengan realisasi 100% dan Persentase nilai 133.33 %

   Dalam Pemanfaatan Data Gender dan Anak, Dinas P3AP2KB kota Batam telah mengintegrasikan Data Terpilah Perempuan dan Anak Kota Batam dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang menjadi basis data gender di dalam SIPUGA dan berhasil meraih penghargaan Nasional dalam Inovasi Perangkat Daerah Pada Tahun 2023

7. Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak dengan realisasi capaian skor sebesar 953.01 dan Persentase nilai 119.13%

   Faktor Pendorong Tercapainya Batam sebagai Kota Layak Anak terproyeksi dari keberhasilan pelaksanaan pemenuhan hak anak yang mencakupi 6 klaster. Dan Kota Batam dalam hal ini meraih peringkat Nindya dalam keberhasilan saat ini melaksanakan pemenuhan hak-hak anak di Kota Batam

8. Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif dengan realisasi 60% dan Persentase nilai 109.09.

   Kelompok Bina Ketahanan yang dibentuk Dinas P3AP2KB Kota Batam pada tahun 2024 sebanyak 416 kelompok, terdiri dari 191 BKB, 66 BKL, 51 BKR, 72 PIK-R dan 36 UPPKA. Melalui pembinaan kelompok

ketahanan keluarga diharapkan dapat meningkatkan kualitas ketahanan keluarga yang berkarakter dan unggul sebagai representasi tingkat kesejahteraan keluarga di Kota Batam.

Sedangkan 4(empat) indikator yang tercapai sesuai target adalah :

1. Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan dengan realisasi capaian 100% dan Persentase nilai 100%

   Secara umum pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan sepanjang tahun 2024 telah berjalan dengan baik, dan mendukung terhadap program teknis terkait tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Namun yang perlu mendapat perhatian khusus adalah peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM internal yang diharapkan dapat berpryoeksi terhadap ketercapaian sasaran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Batam

2. Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan dengan realisasi 100% dan Persentase nilai 100%
   Pencapaian ini didorong oleh hal-hal sebagai berikut :
   - Kerjasama dan sinergitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan locus kejadian
   - Adanya keterbukaan informasi dari masyarakat akan tindak kekerasan yang dialami
3. Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan dengan realisasi capaian 100% dan Persentase nilai 100%
   - Dengan adanya Kerjasama dan sinergitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan locus kejadian dan keterbukaan sekolah maupun masyarakat terkait tindak kekerasan yang dialami oleh anak maka indikator kinerja ini pun telah terlaksana dengan baik sepanjang tahun 2024.
4. Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK dengan realiasi 50% dan Persentase nilai 100%

   Implementasi GDPK di Kota Batam masih memerlukan perhatian lanjutan ke depannya, sekalipun Dokumen Grand Design Kependudukan telah di buat namun masih perlu pembenahan dan optimalisasi pelaksanaan GDPK lintas sektoral yang bersinggungan dengan pelaksanaan design kependudukan.

2(dua) Indikator yang tercapai diatas rata-rata 90% yaitu :

1. Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam dengan realisasi 4.49% dan Persentase nilai 94.53%

Dalam upaya peningkatan SDM perempuan Dinas P3AP2KB sepanjanga tahun 2024 telah mengadakan pelatihan soft skill bagi perempuan kota Batam yang mencakup pelatihan tata rias, tata boga, kuliner, public speaking dan kewirausahaan perempuan. Pelatihan ini menyasar ibu rumah tangga atau ibu yang tidak bekerja dengan tujuan memberdayakan perempuan dalam kegiatan peningkatan SDM untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sejahtera. Adapun total perempuan yang dibina dan dilatih sebanyak 21.020 perempuan dari total perempuan produktif kota Batam 23.596. maka dari target yang ditetapkan terhadap peningkatan SDM Perempuan sebesar 4.75% telah tercapai 4.49% dan pencapaian ini cukup baik namun perlu adanya peningkatan pada periode berikutnya dan perlu adanya pembinaan lanjutan bagi perempuan yang sudah dilatih agar terus aktif dan berkontribusi dalam pembangunan kota Batam.

2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) dengan realisasi 81.58 dan Persentase nilai sebesar 99.49%

   Pokok persoalan pada pemakaian kontrasepsi masa kini adalah adanya stigma negative penggunaan alat kontrasepsi khususnya Kontrasepsi Modern wanita dan Kontrasepsi Modern pria. Masih adanya kecenderungan masyarakat merasa takut dan enggan akibat adanya pengaruh efek samping medis maupun kedudukan social pria dalam menggunakan kontrasepsi KB. Dari target sebesar 82 % pemakaian kontrasepsi pada tahun 2024 tercapai 81.58% dan hal ini sudah merepresentasikan kinerja pelayanan KB yang cukup baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kota Batam walaupun belum tercapai 100%.

Dan 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu :

1. Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan realisasi kenaikan kasus sebesar 52 % dari tahun sebelumnya dalam arti kasus tidak mengalami penurunan namun meningkat pada angka 52 %

   Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dalam hal ini didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut :

   a. Kesadaran, kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan semakin tinggi
   b. Terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang mulai banyak diketahui oleh masyarakat kota Batam sebagai lembaga untuk pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak

c. Peran satgas, Rumah sakit, jejaring mitra dan stakeholder terkait meningkat
d. Peran media sosial sebagai sarana informasi terjadinya tindak kekerasan mempercepat penjangkauan korban

Grafik 2. 3 Data Kekerasan Perempuan dan Anak

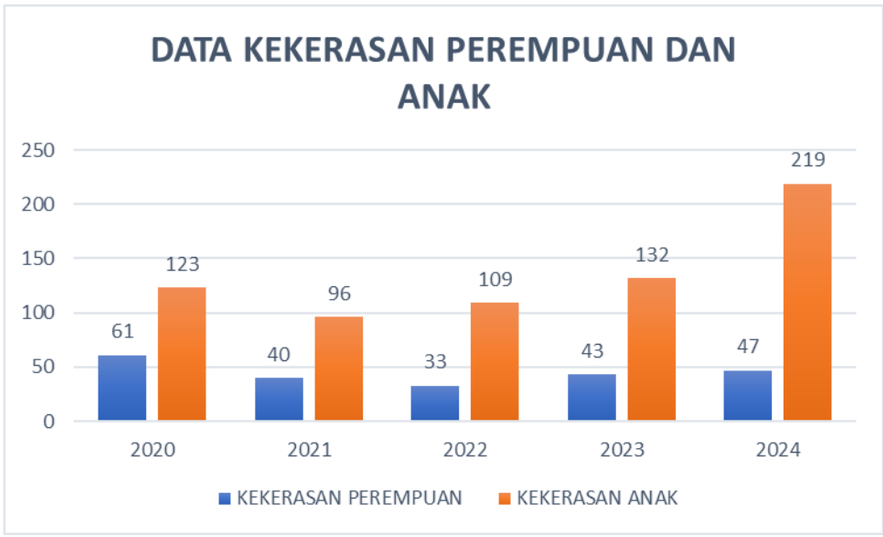

Sumber Data : Laporan Tahunan UPTD PPA

Melalui grafik di atas di gambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Batam dalam kurun 5 tahun terakhir angkanya meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2021 dan 2022 cenderung menurun namun kekerasan perempuan dan anak kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Dari tahun 2022 ke tahun 2024 kekerasan perempuan dan anak meningkat dengan tajam. Kekerasan cenderung lebih tinggi terjadi pada anak dibandingkan dengan perempuan. Kekerasan pada anak meningkat sebesar 65.9% dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Secara akumulatif Pada tahun 2024 ada kenaikan 52% angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di bandingkan tahun 2023 yang meliputi 47 orang kekerasan perempuan dan 219 orang kekerasan pada anak dengan total keseluruhan sebanyak 266 orang. Sedangkan pada tahun 2023 kekerasan perempuan dan anak hanya sebanyak 175 orang. Data ini sesuai dengan yang terlapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Pada masa kini masalah pada anak adalah masalah yang cukup serius dan kompleks. Melalui upaya preventif dan mitigasi Dinas Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan sosialisasi dengan intens kepada orang tua dan masyarakat umum sehingga upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih progressif lagi.

Pelaksanaan sosialisasi ini juga melibatkan stakeholder dan dinas terkait dalam rangka penguatan koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Dengan ada nya keterbukaan informasi terhadap masyarakat maka belakangan ini masyarakat yang mendapatkan kekerasan proaktif dan cenderung lebih terbuka melaporkan kekerasan yang mereka alami. Demikian halnya dengan terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang memperkuat basis layanan kemasyarakatan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak telah memberikan ruang dan akses bagi korban untuk melapor kepada pemerintah. Keterbukaan akses dan informasi teknologi melalui internet kerap memicu terjadinya aksi kekerasan dan perilaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur terutama dan cenderung pelaku kejahatan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah kandung, kerabat yang tinggal di rumah dan tetangga sekitar. Pada tahun 2024 dari 219 orang anak yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 150 orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan tentunya bagi kelangsungan genderasi penerus bangsa Indonesia. Disamping itu dapat dijelaskan bahwa psikologis hidup keluarga yang rapuh dan tidak kuat dalam fondasi nilai moral dan sosial memicu kecenderungan perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Sepanjang tahun 2024 sebanyak 266 orang perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mencakupi 47 orang kekerasan terhadap perempuan per total perempuan 638.206 dan 219 orang kekerasan terhadap anak per total anak kota Batam saat ini sebesar 411.364 orang. Disamping keterbukaan akses dan keberanian masyarakat untuk melapor, salah satu yang melatarbelakangi hal ini adalah rapuhnya nilai tatanan keluarga terkait kaidah norma dan sosial yang perlu mendapat edukasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak diharapkan dapat menjadi prioritas perbaikan selanjutnya. Selain itu hal ini juga di latar belakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat kota Batam yang dengan tuntutan hidup secara ekonomi dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di tahun 2024 ini yang sangat terbatas jumlahnya. Dan meningkatnya peluang/ kesempatan melakukan aksi pelecehan karena keterbukaan informasi dan teknologi melalui handphone dan gadget menyebabkan kerentanan yang lebih tinggi bagi perempuan dan anak mengalami kekerasan baik kekerasan ekonomi maupun psikologis terutama seksual.

Pada umumnya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual yang meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan. Menyikapi keadaan ini Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam gencar melakukan sosialisasi Perda Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak di tingkat kecamatan maupun kelurahan Kota Batam. Maka dengan aktif mensosialisasikan perda tersebut diharapkan perlindungan terhadap anak dapat ditingkatkan sehingga proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik. Disamping itu untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dilaksanakan pembentukan Satgas Anti kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dibentuk pada 2 pos yaitu Kelurahan Mangsang dan kelurahan Tanjung Riau. Satgas ini memberdayakan masyarakat agar aktif memantau dan mengawai kondisi sekitar terkait perkembangan dan perlindungan anak di kota Batam.

2.1.4.Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas P3AP2KB Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Perempuan secara umum, Kelompok perempuan rentan (disabilitas, kepala keluarga), perempuan Korban Kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya, dan Perempuan ibu rumah tangga serta yang terlibat dalam wirausaha/UMKM.
2. Organisasi Perempuan dan Kelompok Masyarakat yang merupakan mitra dalam upaya pemberdayaan perempuan.
3. Anak-anak secara umum, Anak Korban Kekerasan (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran), anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan layanan darurat, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, anak membutuhkan dukungan kesehatan dan perlindungan dari diskriminasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
4. Masyarakat dan kelompok/komunitas peduli anak, LSM dan Universitas/Sekolah
5. Perusahaan yang terlibat dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia.
6. Pasangan usia subur

7. Masyarakat, sekolah, keluarga, kelompok pembinaan ketahanan keluarga yang terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan keluarga menuju keluarga unggul dan berkarakter
8. Stakeholder terkait yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga seja

Tabel 2. 7 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas P3AP2KB Kota Batam

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Prov Kepri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
▪ Peningkatan produktivitas perempuan melalui peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi ▪ Peningkatan keterlibatan dalam politik dan pengambilan keputusan ▪ Pengembangan kelembagaan dalam pemenuhan hak anak	▪ Belum optimalnya upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak ▪ Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan ▪ Belum optimalnya pembinaan, pergerakan, pengawasan kelompok ketahanan keluarga		▪ **Demografi Global** ▪ **Urbainsasi Dunia** ▪ Kelas Menengah ▪ Disrupsi Teknologi	▪ **Rendahnya produktivitas** ▪ **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia** ▪ Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat ▪ Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	▪ **Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal** ▪ Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal. ▪ Kemiskinan dan Pengangguran ▪ Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal ▪ Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal ▪ Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi ▪ Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup	▪ Kesetaraan dan keadilan Gender Dalam Pembangunan Kota Batam ▪ Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan ▪ Pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak ▪ Kelestarian Ber-KB ▪ Pernikahan Usia Dini ▪ Penguatan Kelompok Kegiatan untuk melakukan KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera ▪ Komptetensi SDM Internal ▪ Penguatan Koordinasi lintas sektoral

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Prov Kepri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
▪ Peningkatan kuliatas layanan perlindungan anak dan perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak ▪ Peningkatan perencanaan keluarga dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk						

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Batam

Dinas P3AP2KB Kota Batam memiliki beberapa permasalahan yang dibagi berdasarkan Urusan, yaitu:

2.2.1.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya peningkatan kualitas perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan perempuan pemerintah kota Batam mengusung program pengarusutamaan gender sebagai salah satu isu strategis pembangunan kota Batam periode 2025-2029. Pembangunan kota Batam ke depannya diharapkan berbasis pengarusutamaan gender sesuai peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada satuan perangkat Daerah Kota Batam.

Konsep gender sebagai strategi untuk mencapai keadilan dan kesetraan gender terkait dengan aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan, anak dan kaum difabel dalam konteks kehidupan sosial yang bersinergi dengan proses pembangunan kota Batam. Maka dalam hal ini pelaksanaan program pengarusutamaan gender ini perlu inisiasi dini dari seluruh pemangku kepentingan sehingga penerapan PUG pada sector pembangunan kota Batam dapat dirasakan dampaknya secara luas oleh seluruh masyarakat. Konsep PUG yang dilaksanakan terkait dengan sinergitas kehidupan perempuan, laki-laki anak dan kaum difabel dalam progres pembangunan kota Batam 5 (lima) tahun ke depannya.

Jika isu gender telah diimplementasikan dengan benar maka implikasi terhadap pencapaian indeks pembangunan gender kota Batam akan terproyeksi dengan baik dalam tahapan pembangunan kota Batam.

Berikut ini beberapa point sebagai permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus saat ini yaitu:

1. Belum optimalnya Upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum optimalnya peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan kota Batam

2.2.1.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam mengupayakan akselerasi dan kordinasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang program pembangunan keluarga termasuk kepada ruang lingkup pergaulan remaja masa kini.

Namun dalam pelaksanaannya menemukan sejumlah persoalan dan tantangan yang tentunya memerlukan koordinasi komprehensif lintas sectoral dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk (TFR) Kota Batam baik lintas vertical dan horizontal. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian utama yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembinaan, pergerakan, pengawasan kelompok ketahanan keluarga

2.2.2 Penentuan Isu Strategis dan Peluang

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam di masa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan. Berdasarkan hasil skoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Kota Batam
2. Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan;
3. Tingkat Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak;
4. Kelestarian Ber-KB
5. Pernikahan Remaja Usia Dini
6. Penguatan Kelompok Kegiatan untuk melaksanakan KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera
7. Kompetensi SDM Internal
8. Penguatan Kerjasama dan koordinasi lintas sektoral

2.2.3 Peluang

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan kota Batam, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam optimalisasi dan peningkatan layanan terhadap perempuan dan anak
3. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak (termasuk LSM)
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
5. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Adanya koordinasi jejaring layanan fasilitas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan KB

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan dan Program yang sinkron dengan RPJMD Kota Batam.

3.1 Tujuan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029, **Visi Kota Batam** adalah ***"Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata"***

Sedangkan Misi dan Sasaran yang menjadi acuan penetapan tujuan Dinas sesuai RPJMD 2025-2029 adalah "***Mewujudkan Kualitas hidup Masyarakat yang Berdaya Saing, Produktif dan Berakhlak Mulia"*** dan sasaran : ***"Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat"***

Maka sesuai dengan sasaran ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan sebuah tujuan yang akan dicapai dalam masa lima tahun mendatang sebagai penjabaran dari visi, misi, dan sasaran walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Tujuan ini juga disusun dengan mempedomani permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan.

"Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter"

3.2 Sasaran

Sasaran Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program yang telah ditetapkan. Untuk mengukur

keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas P3AP2KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah disepakati, maka ditetapkan sasaran sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3AP2KB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

1. **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan**
2. **Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak**
3. **Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan**
4. **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keluarga**
5. **Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan**

Dengan indikator kinerja utama :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
3. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)
4. Total Fertility Rate (TFR)
5. Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah dalam keterkaitannya dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar dan Tabel berikut ini :

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Dinas P3AP2KB

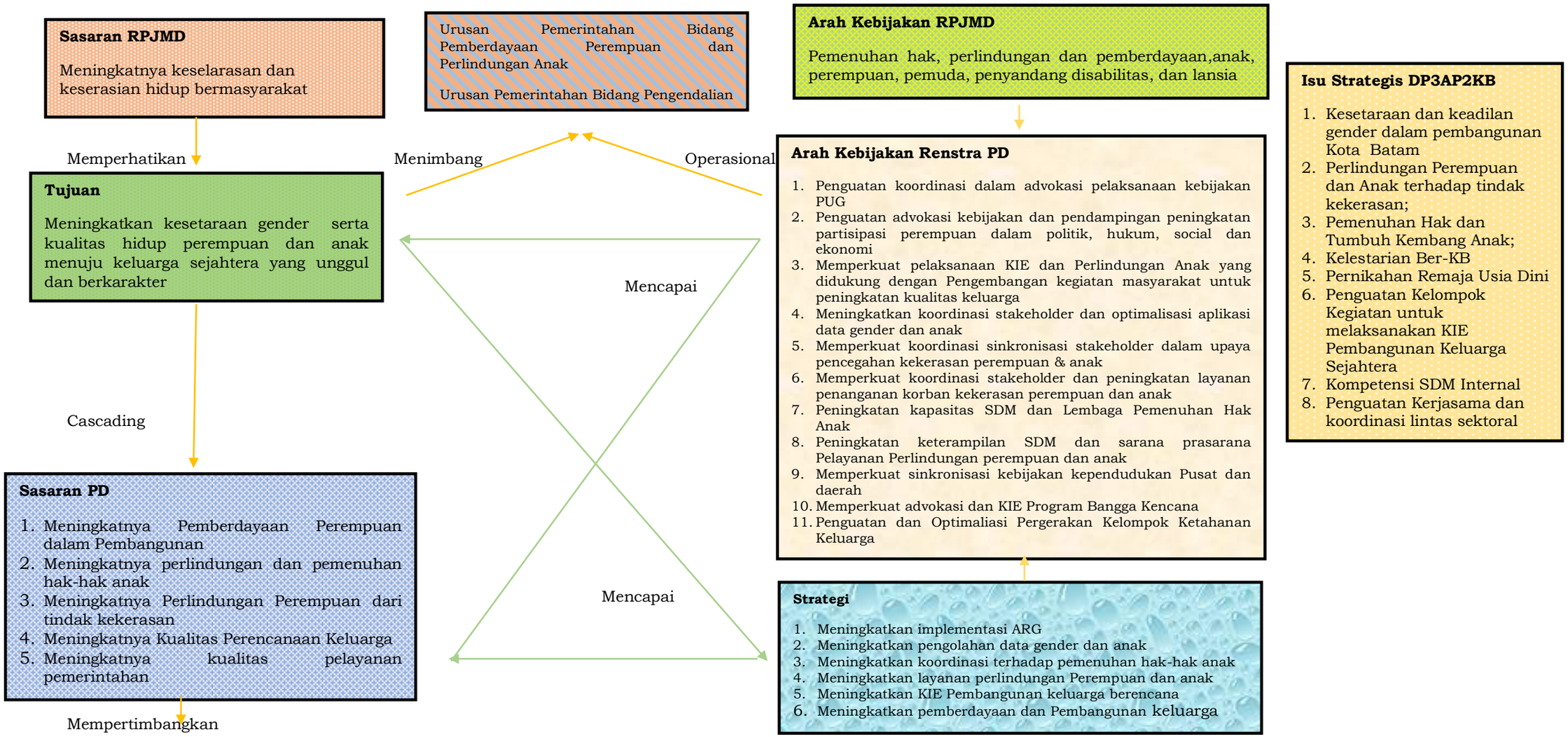

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas P3AP2KB

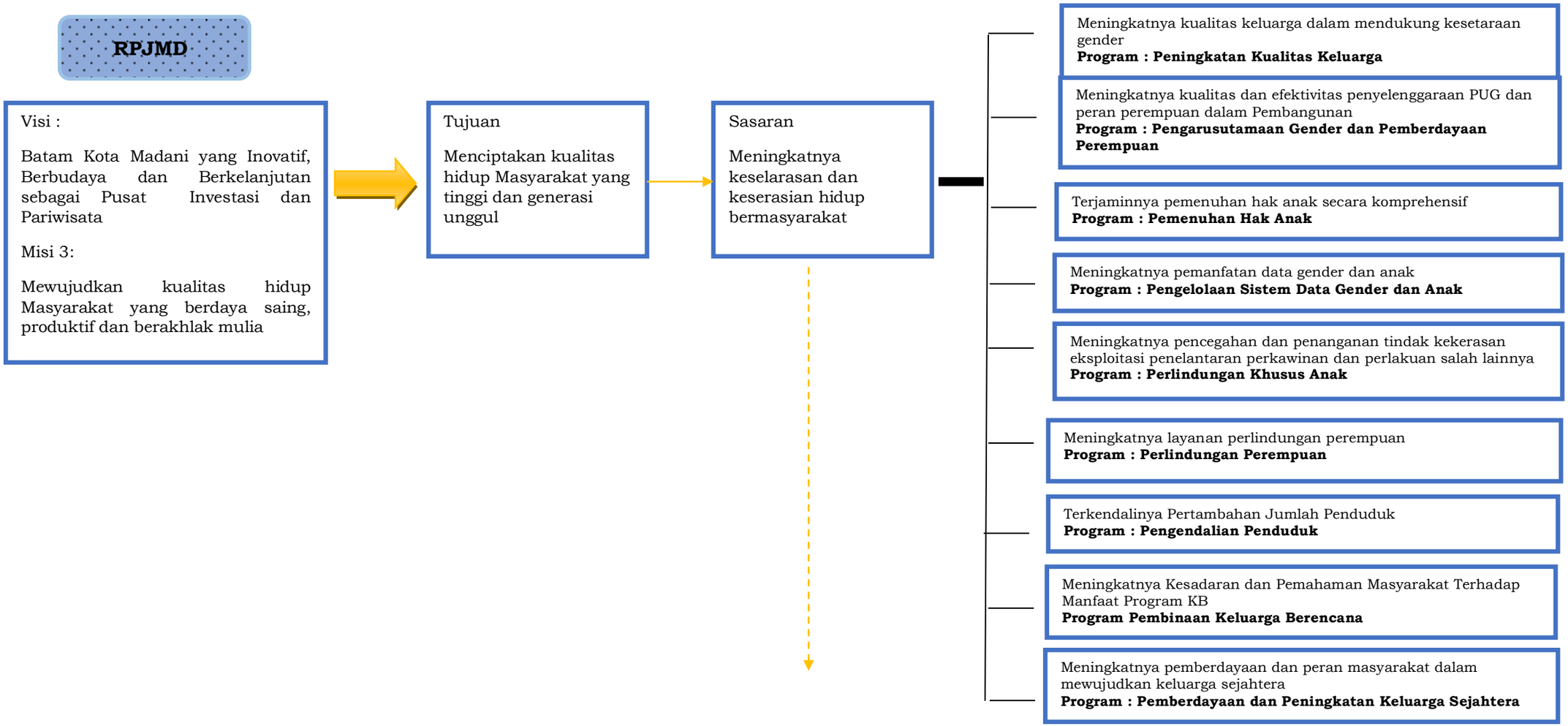

RENSTRA

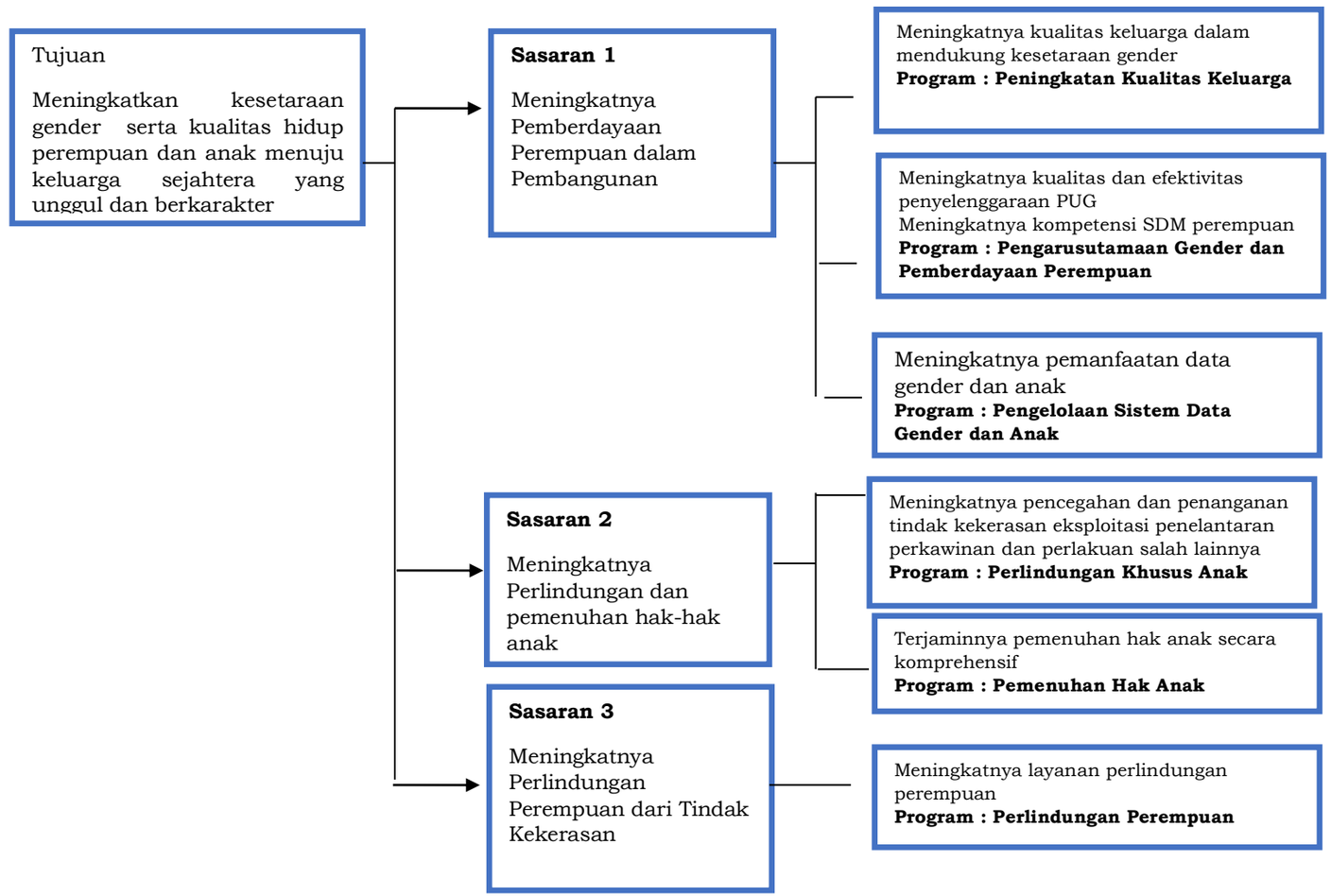
Tujuan
Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter
Sasaran 1
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender
Program : Peningkatan Kualitas Keluarga
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG
Meningkatnya kompetensi SDM perempuan
Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
Program : Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Sasaran 2
Meningkatnya Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya
Program : Perlindungan Khusus Anak
Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif
Program : Pemenuhan Hak Anak
Sasaran 3
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
Meningkatnya layanan perlindungan perempuan
Program : Perlindungan Perempuan

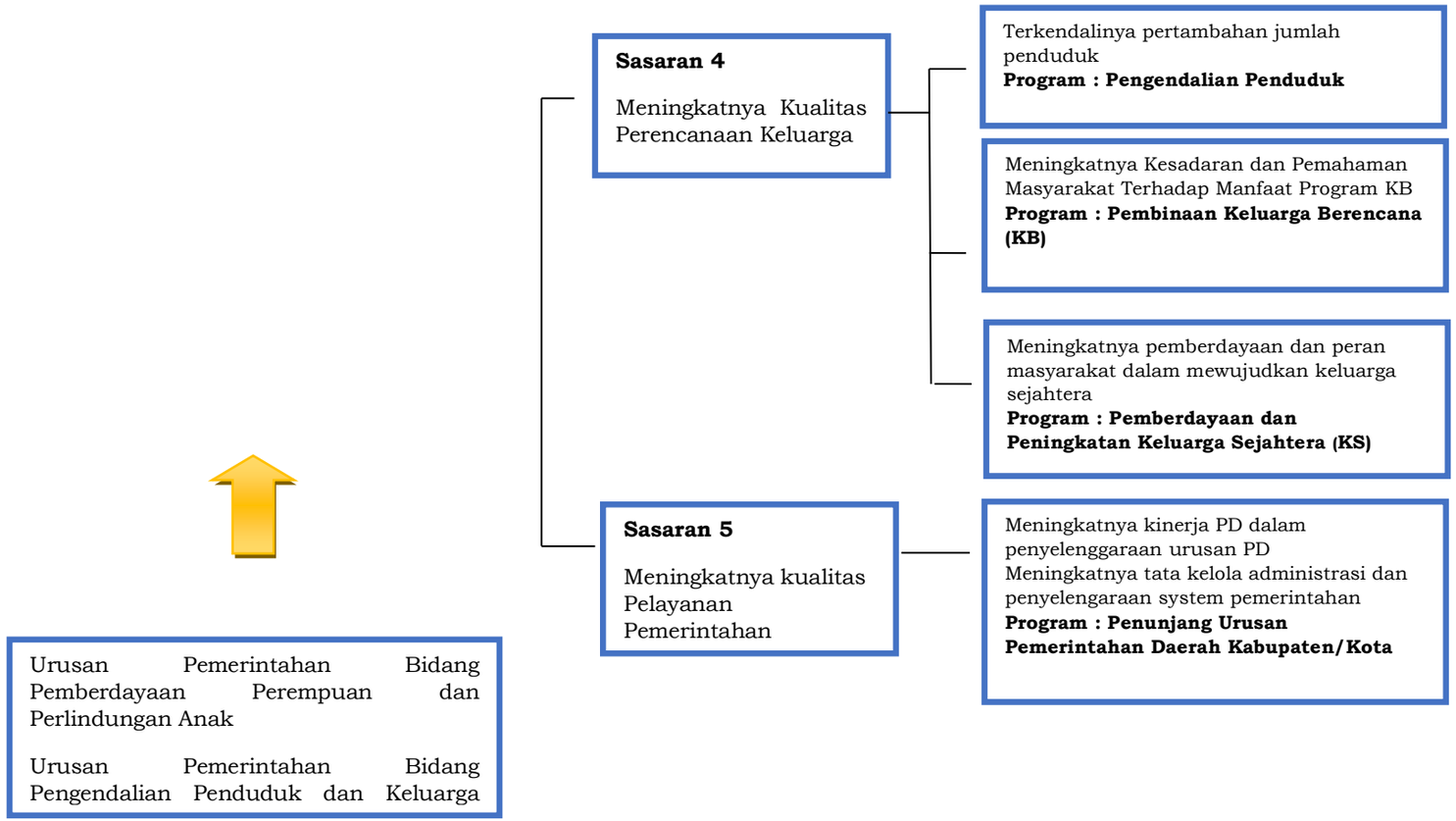
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Sasaran 4
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keluarga
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk
Program : Pengendalian Penduduk
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB
Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera
Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Sasaran 5
Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemerintahan
Meningkatnya kinerja PD dalam penyelenggaraan urusan PD
Meningkatnya tata kelola administrasi dan penyelengaraan system pemerintahan
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	**Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter**		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**95.74**	**95.76**	**95.78**	**95.80**	**95.82**	**95.84**	
			Indeks Pembangunan Keluarga	**67.28%**	**67.30%**	**67.32%**	**67.34%**	**67.36%**	**67.38%**	
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.1928	0.1926	0.1924	0.1922	0.1920	0.1918	
		Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67.410	67.430	67.450	67.470	67.490	67.510	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	**Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter**	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	7.80%	7.75%	7.70%	7.65%	7.60%	7.58%	
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.16%	93.16%	94.16%	95.16%	96.16%	97.16%	

3.3. Strategi

Strategi Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029 adalah langkah-langkah komprehensif dalam pencapaian tujuan sasaran Dinas P3AP2KB melalui beberapa tindakan diantaranya optimalisasi komptensi SDM, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Strategi pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029 meliputi:

1. Meningkatkan pengimplementasian Alokasi Anggaran Responsif gender dalam Perencanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Kota Batam
2. Meningkatkan analisis dan pengolahan data gender dan anak dalam penyelenggaraan kebijakan pengarusutamaan gender pada perencanaan program kegiatan stakeholder terkait
3. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan terhadap pemenuhan hak-hak tumbuh kembang anak
4. Meningkatkan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan keluarga berencana dan pengelolaan data kependudukan pada perangkat daerah/ stakeholder terkait dan peningkatan akseptor KB melalui penyuluhan dan pembinaan Keluarga Berencana serta ketersediaan sarana prasarana KB
6. Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan keluarga melalui aktivitas pelatihan/pembinaan ketahanan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
7. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas P3AP2KB dalam penyelenggaraan pemerintahan
8. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan aset Dinas P3AP2KB
9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas P3AP2KB.

Adapun prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas P3AP2KB dapat disajikan dalam tahapan beriku

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi Penguatan regulasi, kelembagaan, koordinasi lintas sektoral dan tata kelola data, peningkatan kompetensi SDM dan perencanaan program keuangan dalam mendukung pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga	Peningkatan kompetensi SDM, KIE public dan pelibatan kelompok rentan untuk mencapai pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga	Akselerasi Program dan pelayanan berkesinambungan inklusif dalam meningkatkan implementasi pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga	Penguatan, Integrasi dan inovasi lintas sektoral guna memastikan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga menuju tercapainya keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter	Pengembangan dan Penguatan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga pada seluruh sector menuju tercapainya keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter

1. Tahap I (2026) : Akselerasi Penguatan regulasi, kelembagaan, koordinasi lintas sektoral dan tata kelola data, peningkatan kompetensi SDM dan perencanaan program keuangan dalam mendukung pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga dengan prioritas pada:
   a. Penguatan Regulasi/Kebijakan Berperspektif Gender dan Anak
   b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan PPA
   c. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor
   d. Penguatan Sistem Tata Kelola Data Terpilah Gender dan Anak
   e. Peningkatan Alokasi Anggaran Responsif Gender dan Anak
   f. Pengembangan Inovasi dan Praktik Baik
   g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Komunitas
2. Tahap II (2027) : Peningkatan kompetensi SDM, KIE public dan pelibatan kelompok rentan untuk mencapai pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga, dengan prioritas pada:
   a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Sensitif Gender dan Hak Anak
   b. Edukasi dan Kampanye Publik tentang Kesetaraan Gender, Hak Anak, dan Ketahanan Keluarga
   c. Pelibatan Aktif Kelompok Rentan dalam Proses Pembangunan
   d. Penguatan Kapasitas Komunitas dan Tokoh Masyarakat
   e. Pengembangan Media Komunikasi dan Informasi yang Inklusif
   f. Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan
3. Tahap III (2028) : Akselerasi Program dan pelayanan berkesinambungan inklusif dalam meningkatkan implementasi pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga, dengan prioritas pada:
   a. Penguatan layanan terpadu berbasis komunitas
   b. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
   c. Akselerasi program pemberdayaan ekonomi perempuan
   d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan ramah anak
   e. Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak
   f. Penguatan peran ayah dan laki-laki dalam pengasuhan dan kesetaraan gender

g. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang komprehensif

4. Tahap IV (2029) : Penguatan, Integrasi dan inovasi lintas sektoral guna memastikan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga menuju tercapainya keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter, dengan prioritas pada:
   a. Penguatan layanan terpadu berbasis komunitas
   b. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
   c. Akselerasi program pemberdayaan ekonomi perempuan
   d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan ramah anak
   e. Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak
   f. Penguatan peran ayah dalam pengasuhan dan kesetaraan gender
   g. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang komprehensif
5. Tahap V (2030) : Pengembangan dan Penguatan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga pada seluruh sektor menuju tercapainya keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter, dengan prioritas pada :
   a. Integrasi Perspektif Gender, Anak, dan Keluarga dalam Perencanaan dan Penganggaran
   b. Peningkatan Akses Setara terhadap Layanan Dasar Berkualitas
   c. Penguatan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi
   d. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
   e. Penguatan Ketahanan dan Fungsi Keluarga
   f. Penguatan Data dan Informasi Terpilah untuk Kebijakan Berbasis Bukti
   g. Peningkatan Peran Laki-laki dan Anak Laki-laki sebagai Mitra dalam Kesetaraan Gender

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Penguatan koordinasi dalam advokasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PUG	
			Penguatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum,social dan ekonomi	
		Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Memperkuat pelaksanaan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak yang didukung dengan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	
			Meningkatkan koordinasi stakeholder dan optimalisasi aplikasi data gender dan anak	
			Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Memperkuat koordinasi antar stake holder dalam upaya peningkatan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendampingan, penjangkauan dan mediasi perempuan dan anak	
	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat		Peningkatan kapasitas SDM dan lembaga pemenuhan hak anak	
			Peningkatan Keterampilan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Perlindungan Khusus Anak	
			Memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah yang melibatkan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk	
			Memperkuat advokasi dan KIE pelaksanaan program Bangga Kencana melalui mitra kerja dan kearifan budaya local	
			Penguatan dan optimalisasi pergerakan kelompok ketahanan keluarga	

Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini

Visi Kota Batam : "*Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Parawisata*"			
Misi Kota Batam yang Diampu PD : "*Mewujudkan Kualitas hidup Masyarakat yang Berdaya Saing, Produktif dan Berakhlak Mulia*"			
Tujuan : *Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter*			
Sasaran: Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat			
Strategi : Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan pengimplementasian Alokasi Anggaran Responsif gender dalam Perencanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Kota Batam	Penguatan koordinasi dalam advokasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PUG

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum,sosial dan ekonomi
			Memperkuat pelaksanaan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak yang didukung dengan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga
		Meningkatkan analisis dan pengolahan data gender dan anak dalam penyelenggaraan kebijakan pengarusutamaan gender pada perencanaan program kegiatan stakeholder terkait	Memperkuat koordinasi stakeholder dan optimalisasi aplikasi data gender dan anak
	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan terhadap pemenuhan hak-hak tumbuh kembang anak	Peningkatan kapasitas SDM dan lembaga pemenuhan hak anak
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Meningkatkan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Memperkuat koordinasi antar stake holder dalam upaya peningkatan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendampingan, penjangkauan dan mediasi perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan Keterampilan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Perlindungan Khusus Anak
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Keluarga	Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan keluarga berencana dan pengelolaan data kependudukan pada perangkat daerah/ stakeholder terkait dan peningkatan akseptor KB melalui penyuluhan dan pembinaan Keluarga Berencana serta ketersediaan sarana prasarana KB	Memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah yang melibatkan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk
			Memperkuat advokasi dan KIE pelaksanaan program Bangga Kencana melalui mitra kerja dan kearifan budaya local
		Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan keluarga melalui aktivitas pelatihan/pembinaan ketahanan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera	Penguatan dan optimalisasi pergerakan kelompok ketahanan keluarga

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN PENYELENGGARAAN KINERJA URUSAN

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN & PENYELENGGARAAN KINERJA URUSAN

4.1 Uraian Program

Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebagai inisiatif strategis Dinas P3AP2KB Kota Batam perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih bersifat taktis operasional. Program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam tahun 2025-2029, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas PD, Program/ Kegiatan Lintas PD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2025-2029. Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Program Dinas P3AP2KB Kota Batam disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Batam yang berpedoman kepada Kepmendagri Nomor 900.1-2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegitan Renstra Perangkat Daerah

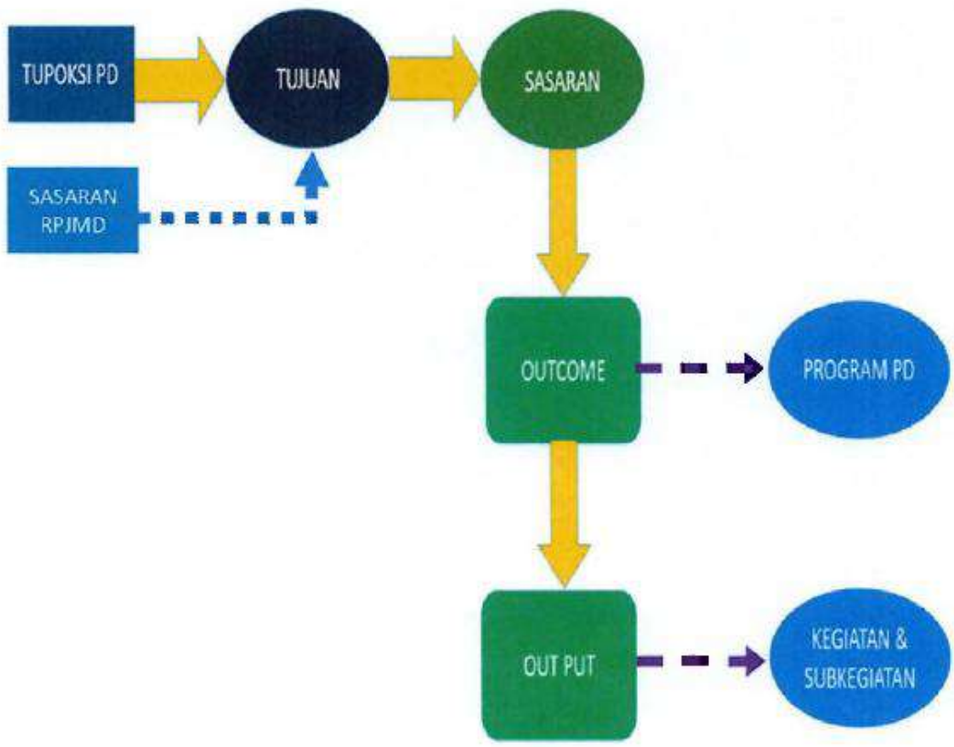

4.2. Uraian Kegiatan

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029 terdiri dari 23 Kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
15. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanandan Pembinaan KesertaanBer-KB
22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persentase) Indeks Pembangunan Keluarga (Persentase)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pembinaan PPRG dan Gap GBS di lingkup OPD	Persentase OPD yang dibina dan berhasil (Dengan Satuan:Persentase)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kompetensi SDM perempuan		Persentase perempuan yang dibina dan berhasil (Dengan Satuan:Persentase	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pembinaan soft skill perempuan	Persentase perempuan yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam (Dengan Satuan:Persentase)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				Meningkatnya pembianaan kader PKK dan perempuan	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG (Dengan Satuan:Persentase)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terupdatenya data gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Persentase)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani (Persentase)		
			Meningkatnya layanan perlindungan perempuan		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	Program Perlindungan Perempuan	
				Meningkatnya tindkalanjut pengaduan kekerasn perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah Kabupaten/Kota	
						Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya upaya layanan rujukan kekerasan perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang dirujuk (Dengan Satuan:Persentase)	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya		Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	Program Perlindungan Khusus Anak	
				Meningkatnya tindaklanjut pengaduan anak	Persentase pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pencegahan KTA	
						Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pembinaan bagi lembaga penyedia layanan anak	Persentase lembaga layanan anak yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
						Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Skor Capaian Kota Layak Anak (Skor)		
			Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif		Persentase capaian kluster kota layak anak (Dengan Satuan:Persentase)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Meningkatnya lembaga layanan anak yang sesuai standar PHA	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA (Dengan Satuan:Persentase)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keluarga			Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan : Persentase)		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Persentase Stakeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK (Dengan Satuan:Persentase)	Program Pengendalian Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kebijakan GDPK yang diakomodir OPD	Persentase Stakeholder yang mengakomodir GDPK dalam kebijakan (Dengan Satuan:Persentase)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pemanfatan dat SIGA	Persentase pemanfataan data SIGA (Dengan Satuan:Persentase)	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakuan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) (Dengan Satuan:Persentase)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB	Unmeet Need (Dengan Satuan:Persentase)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang ber KB baru (Dengan Satuan:Persentase)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
						Pengendalian Program KKBPK	
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini lapangan atau kader yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan KB (Dengan Satuan:Persentase)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kampung KB yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Meningkatnya pembinaan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (Dengan Satuan:Persentase)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
						Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pendampingan keluarga beresiko stunting	Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan (Dengan Satuan:Persentase)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita)	
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dengan satuan : Poin)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya layanan administrasi Keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Berencana			
				Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD (Perangkat Daerah)	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya jasa penunjang urusan (Perangkat Daerah)	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pemeliharaan BMD (Perangkat Daerah)	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Uraian Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikator keluaran program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.962.526.839		24.337.263.094		26.249.259.294		27.773.589.293		30.858.589.293		34.228.589.293		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			17.738.012.039		16.833.033.894		18.395.030.094		19.769.360.093		21.644.360.093		22.619.360.093		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.793.861.780		14.299.753.394		14.604.715.195		15.324.045.194		16.599.045.194		16.774.045.194	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,87	72,62		74,37		75,37		77,37		79,37		81,37		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90	90		91		92		93		94		95		-
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran , dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	0	0		0		100		100		100		100		-
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				0		0		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daerah															
	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dengan satuan : Dokumen)	0	0		0		5		5		5		5		
2.08.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**0**		**0**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**	
	Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dengan satuan : Laporan)	0	0		0		2		2		2		2		
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12.902.304.288**		**13.596.112.194**		**13.596.112.195**		**14.096.112.194**		**15.096.112.194**		**15.096.112.194**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya layanan administrasi Keuangan	**Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)**	100	100		100		100		100		100		100		-
2.08.01.2.02.0002	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**				**50.540.000**		**50.540.000**		**50.540.000**		**50.540.000**		**50.540.000**		**50.540.000**	-
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		-
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase ASN yang di tingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)														-
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.888.500		150.405.800		315.000.000		405.000.000		480.000.000		555.000.000	
	Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**				**3.461.000**		**4.837.900**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**-**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3		1		1		1		1		1		-
2.08.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				**48.166.000**		**37.788.900**		**60.000.000**		**70.000.000**		**80.000.000**		**90.000.000**	**-**
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	6		6		6		6		6		6		-
2.08.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**				**5.103.000**		**7.016.200**		**30.000.000**		**40.000.000**		**45.000.000**		**50.000.000**	**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		1		-
2.08.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**				**6.175.000**		**7.000.000**		**30.000.000**		**40.000.000**		**45.000.000**		**50.000.000**	**-**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5		3		3		3		3		3		-
2.08.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**				**6.035.500**		**11.996.800**		**30.000.000**		**40.000.000**		**45.000.000**		**50.000.000**	**-**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2		2		2		2		2		2		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.2.06.0009	**Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**				**148.948.000**		**81.766.000**		**150.000.000**		**200.000.000**		**250.000.000**		**300.000.000**	**-**
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**148.329.432**		**265.800.400**		**384.688.000**		**484.688.000**		**684.688.000**		**784.688.000**	
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD (Perangkat Daerah)	**Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		tase)														
2.08.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**				**0**		**110.235.500**		**179.688.000**		**179.688.000**		**279.688.000**		**379.688.000**	**-**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		33		33		33		33		33		-
2.08.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**				**148.329.432**		**155.564.900**		**205.000.000**		**305.000.000**		**405.000.000**		**405.000.000**	**-**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	18	18		14		18		20		22		24		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.2.07.0009	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	-
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		1		0		0		0		0		-
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**288.716.560**		**110.450.000**		**100.450.000**		**100.450.000**		**100.450.000**		**100.450.000**	
	Tersedianya jasa penunjang urusan (Perangkat Daerah)	**Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**				**121.886.400**		**108.650.000**		**98.650.000**		**98.650.000**		**98.650.000**		**98.650.000**	**-**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-
2.08.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**				**166.830.160**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**	**-**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan	4	12		12		12		12		12		12		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Satuan: Laporan)														
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**236.623.000**		**176.985.000**		**198.465.000**		**227.795.000**		**227.795.000**		**227.795.000**	
	Terlaksananya pemeliharaan BMD (Perangkat Daerah)	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan: Persentase)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**				**81.530.000**		**74.130.000**		**81.530.000**		**81.530.000**		**81.530.000**		**81.530.000**	-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	2	2		1		1		1		1		1		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**				**80.805.000**		**73.525.000**		**80.805.000**		**80.805.000**		**80.805.000**		**80.805.000**	-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	7		8		8		8		8		8		-
2.08.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**				**14.410.000**		**29.330.000**		**34.330.000**		**34.330.000**		**34.330.000**		**34.330.000**	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	26	26		26		28		30		32		34		-
2.08.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**				**59.878.000**		**0**		**0**		**29.330.000**		**29.330.000**		**29.330.000**	**-**
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		1		1		1		-
2.08.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**				**0**		**0**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**	**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		1		1		1		1		-
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**1.076.343.000**		**509.927.600**		**810.000.000**		**965.000.000**		**1.115.000.000**		**1.265.000.000**	
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	**Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam (Dengan Satuan: Persentase)**	**11,93**	**12,0**		**12,20**		**12,50**		**12,70**		**12,90**		**13,0**		**BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kompetensi SDM perempuan	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil (Dengan Satuan: Persentase)	75	78		80		82		84		85		85		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota				10.328.000		45.000.000		145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
	Meningkatnya pembinaan PPRG dan Gap GBS di lingkup OPD	Persentase OPD yang dibina dan berhasil (Dengan Satuan: Persentase)	70	80		82		84		86		88		90		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.2.01.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota**				**10.328.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	-
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	35	45												-
2.08.02.2.01.0007	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota**				**0**		**45.000.000**		**145.000.000**		**200.000.000**		**250.000.000**		**300.000.000**	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Dengan Satuan: Laporan)	35	0		45		45		45		45		45		-
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**				**1.066.015.000**		**464.927.600**		**665.000.000**		**765.000.000**		**865.000.000**		**965.000.000**	
	Meningkatnya pembinaan soft skill perempuan	**Persentase perempuan yang dibina (Dengan Satuan: Persentase)**	**75**	**78**		**80**		**82**		**84**		**85**		**85**		**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.2.02.0001	**Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**				**1.066.015.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2												-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.2.02.0008	**Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota**				**0**		**464.927.600**		**665.000.000**		**765.000.000**		**865.000.000**		**965.000.000**	-
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Dengan Satuan:Orang)	2	0		360		400		440		480		500		-
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**101.923.500**		**346.621.000**		**552.565.000**		**752.565.000**		**852.565.000**		**1.052.565.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota				24.358.500		220.000.000		375.000.000		475.000.000		575.000.000		675.000.000	
	Meningkatnya tindkalanjut pengaduan kekerasn perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklnjuti (Dengan Satuan: Persentase)	40	50		50		50		50		50		50		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.03.2.01.0001	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**				**24.358.500**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:	55	55												-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dokumen)														
2.08.03.2.01.0004	**Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/ Kota**				**0**		**220.000.000**		**375.000.000**		**475.000.000**		**575.000.000**		**675.000.000**	-
	Terlaksananya kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	55	0		4		4		4		4		4		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				77.565.000		126.621.000		177.565.000		277.565.000		277.565.000		377.565.000	
	Meningkatnya upaya layanan rujukan kekerasan perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang dirujuk (Dengan Satuan:Persentase)	30	50		50		50		50		50		50		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.03.2.02.0002	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota**				**77.565.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:	47	45												-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Layanan)														
2.08.03.2.02.0008	**Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota**				**0**		**126.621.000**		**177.565.000**		**277.565.000**		**277.565.000**		**377.565.000**	**-**
	Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	47	0		43		41		39		37		35		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				2.237.817.759		828.636.900		1.128.674.899		1.228.674.899		1.328.674.899		1.428.674.899	
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender	Persentase Peningkatan Kapasitas S D M perempuan di Kota Batam (Dengan Satuan: Persentase)	4,49	4,6		4,7		4,8		4,9		5,0		5,2		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				2.237.817.759		828.636.900		1.128.674.899		1.228.674.899		1.328.674.899		1.428.674.899	
	Meningkatnya pembianaan kader PKK dan perempuan	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina	71	72		73		74		75		76		77		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		(Dengan Satuan:Persentase)														
2.08.04.2.01.0003	**Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota**				**2.237.817.759**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2												-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				0		828.636.900		1.128.674.899		1.228.674.899		1.328.674.899		1.428.674.899	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	2	0		200		200		200		200		200		-
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**17.223.000**		**45.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17.223.000		45.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	
	Terupdatenya data gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang aktif (Dengan Satuan:Persen	85	80		85		85		85		85		85		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		tase)														
2.08.05.2.01.0002	**Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota**				**17.223.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	-
	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	44	44												-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.05.2.01.0003	**Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota**				**0**		**45.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**	**-**
	Terlaksananya Penyediaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak diKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	3	0		3		3		3		3		3		-
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**187.748.000**		**480.000.000**		**650.000.000**		**750.000.000**		**850.000.000**		**1.050.000.000**	
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	**Persentase capaian kluster kota layak anak (Dengan Satuan:Persentase)**	**70**	**72**		**75**		**78**		**80**		**82**		**85**		**BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				187.748.000		480.000.000		650.000.000		750.000.000		850.000.000		1.050.000.000	
	Meningkatnya lembaga layanan anak yang sesuai standar PHA	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA (Dengan Satuan: Persentase)	68	70		75		78		80		82		84		-
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				187.748.000		0		0		0		0		0	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5												-
2.08.06.2.01.0003	**Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**0**		**480.000.000**		**650.000.000**		**750.000.000**		**850.000.000**		**1.050.000.000**	**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pelaknsanaan kebijakan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah dna non pemerintah media dan media usaha kesenangan kabupaten/kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	5	0		456		456		456		456		456		-
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**323.095.000**		**323.095.000**		**504.075.000**		**604.075.000**		**754.075.000**		**904.075.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota				101.500.000		101.500.000		151.500.000		201.500.000		251.500.000		251.500.000	
	Meningkatnya tindaklanjut pengaduan anak	Persentase pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	70	70		70		70		70		70		70		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.07.2.01.0004	**Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA**				**101.500.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	-
	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Dengan Satuan:Orang)	40	40												-
2.08.07.2.01.0010	**Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan**				**0**		**101.500.000**		**151.500.000**		**201.500.000**		**251.500.000**		**251.500.000**	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kabupaten/ Kota															
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KTA kewenangan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:Orang)	40	0		50		60		70		85		100		-
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				**152.575.000**		**152.575.000**		**252.575.000**		**252.575.000**		**352.575.000**		**352.575.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**-**
2.08.07.2.02.0007	**Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK**				**152.575.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Dengan Satuan: Layanan)	52	52												-
2.08.07.2.02.0008	**Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kot**				**0**		**152.575.000**		**252.575.000**		**252.575.000**		**352.575.000**		**352.575.000**	**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	a															
	Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	219	0		217		215		213		211		209		-
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**69.020.000**		**69.020.000**		**100.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**300.000.000**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pembianaan bagi lembaga penyedia layanan anak	**Persentase lembaga layanan anak yang dibina (Dengan Satuan: Persentase)**	**50**	**50**		**50**		**60**		**70**		**80**		**90**		**-**
2.08.07.2.03.0006	**Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota**				**69.020.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Dengan Satuan:Orang)	40	40												-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		69.020.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan pelrindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Dengan Satuan:Lembaga)	40	0		15		15		15		15		15		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.224.514.800		7.504.229.200		7.854.229.200		8.004.229.200		9.214.229.200		11.609.229.200		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				324.720.000		354.600.000		454.600.000		454.600.000		514.600.000		759.600.000	
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Stakeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK (Dengan Satuan:Persentase)	60	60		62		64		66		68		70		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				15.120.000		45.000.000		145.000.000		145.000.000		205.000.000		300.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kebijakan GDPK yang diakomodir OPD	Persentase Stakeholder yang mengakomodir GDPK dalam kebijakan (Dengan Satuan:Persentase)	60	60		62		64		66		68		70		-
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				15.120.000		0		0		0		0		0	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1												-
2.14.02.2.01.0025	**Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota**				**0**		**45.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**		**205.000.000**		**300.000.000**	**-**
	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunann Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokum	1	0		1		1		1		1		1		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		en)														
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**309.600.000**		**309.600.000**		**309.600.000**		**309.600.000**		**309.600.000**		**459.600.000**	
	Meningkatnya pemanfatan dat SIGA	**Persentase pemanfataan data SIGA (Dengan Satuan:Persentase)**	**60**	**60**		**65**		**70**		**75**		**80**		**85**		**-**
2.14.02.2.02.0009	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga**				**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**110.000.000**	**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-
2.14.02.2.02.0012	**Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga**				**249.600.000**		**249.600.000**		**249.600.000**		**249.600.000**		**249.600.000**		**349.600.000**	**-**
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**3.154.706.800**		**3.249.236.800**		**3.299.236.800**		**3.349.236.800**		**3.399.236.800**		**4.449.236.800**	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) (Dengan Satuan:Persentase)	81,58	81,60		81,65		81,70		81,75		81,80		82		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB	Unmeet Need (Dengan Satuan:Persentase)	11,1	11		10,9		10,8		10,7		10,6		10,5		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.017.786.800		1.112.316.800		1.112.316.800		1.112.316.800		1.112.316.800		1.712.316.800	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Persentase PUS yang ber KB baru (Dengan Satuan:Persentase)**	**50**	**52**		**54**		**56**		**58**		**60**		**65**		**-**
2.14.03.2.01.0008	**Pengendalian Program KKBPK**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Dengan Satuan:Laporan)	0	0		4		4		4		4		4		-
2.14.03.2.01.0010	**Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana**				**628.316.800**		**628.316.800**		**628.316.800**		**628.316.800**		**628.316.800**		**828.316.800**	**-**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		4		4		4		4		4		-
2.14.03.2.01.0011	**Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),**				**240.000.000**		**240.000.000**		**240.000.000**		**240.000.000**		**240.000.000**		**340.000.000**	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	dan Mini Lokakarya (Minilok)															

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		4		4		4		4		4		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.01.0012	**Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**				**34.000.000**		**34.000.000**		**34.000.000**		**34.000.000**		**34.000.000**		**134.000.000**	**-**
	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		4		4		4		4		4		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.01.0013	**Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**15.470.000**		**110.000.000**		**110.000.000**		**110.000.000**		**110.000.000**		**210.000.000**	-
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.01.0014	**Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**				**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**200.000.000**	**-**
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dengan Satuan:Organisasi)	96	96		96		96		96		96		96		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**512.000.000**		**512.000.000**		**512.000.000**		**512.000.000**		**512.000.000**		**612.000.000**	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase tenaga lini lapangan atau kader yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)**	**70**	**70**		**70**		**70**		**70**		**70**		**70**		-
2.14.03.2.02.0004	**Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**				**512.000.000**		**512.000.000**		**512.000.000**		**512.000.000**		**512.000.000**		**612.000.000**	-
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dengan Satuan:Orang)	619	619		619		619		619		619		619		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota				1.473.720.000		1.473.720.000		1.473.720.000		1.473.720.000		1.473.720.000		1.673.720.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan KB (Dengan Satuan:Persentase)	83	84		85		86		87		88		89		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.03.0001	**Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**				**158.400.000**		**158.400.000**		**158.400.000**		**158.400.000**		**158.400.000**		**258.400.000**	-
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendaliann Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.03.0003	**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**				**1.222.620.000**		**1.222.620.000**		**1.222.620.000**		**1.222.620.000**		**1.222.620.000**		**1.222.620.000**	**-**
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (M K J P) (Dengan Satuan:Orang)	625	625		675		725		775		825		875		-
2.14.03.2.03.0006	**Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**
	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dengan Satuan:Unit)	0	0		5		5		5		5		5		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.03.0008	**Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**				**92.700.000**		**92.700.000**		**92.700.000**		**92.700.000**		**92.700.000**		**192.700.000**	-
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				151.200.000		151.200.000		201.200.000		251.200.000		301.200.000		451.200.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kampung KB yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	70	72		74		76		78		80		82		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.2.04.0006	**Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas**				**151.200.000**		**151.200.000**		**201.200.000**		**251.200.000**		**301.200.000**		**451.200.000**	**-**
	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Kampung)	13	13		13		13		13		13		13		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				3.745.088.000		3.900.392.400		4.100.392.400		4.200.392.400		5.300.392.400		6.400.392.400	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina (Dengan Satuan:Persentase)	60	65		70		75		80		85		90		BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				154.688.000		309.992.400		509.992.400		609.992.400		1.009.992.400		1.209.992.400	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pembinaan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga(Dengan Satuan: Persentase)	70	72		74		76		78		80		82		-
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Dengan Satuan:Unit)	20	20		20		20		20		20		20		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				24.688.000		179.992.400		379.992.400		479.992.400		879.992.400		1.079.992.400	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				3.590.400.000		3.590.400.000		3.590.400.000		3.590.400.000		4.290.400.000		5.190.400.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pendampingan keluarga beresiko stunting	Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan (Dengan Satuan:Persentase)	70	70		72		74		76		78		80		-
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil , Pasca salin/kelahiran,				1.632.000.000		1.632.000.000		1.632.000.000		1.632.000.000		1.932.000.000		2.432.000.000	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Baduta/Balita)															
	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil , Pascasalin / kelahiran , Baduta/Balita) (Dengan Satuan: laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-
2.14.04.2.02.0006	**PendampinganKeluargaBerisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran,**				**1.958.400.000**		**1.958.400.000**		**1.958.400.000**		**1.958.400.000**		**2.358.400.000**		**2.758.400.000**	-

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Baduta/Balita															
	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin / kelahiran , Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (Dengan Satuan:laporan)	12	12		12		12		12		12		12		-
			JML	**24.962.526.839**		**24.337.263.094**		**26.249.259.294**		**27.773.589.293**		**30.858.589.293**		**34.228.589.293**		

4.4.Penyelenggaraan Kinerja Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Target Kinerja ini juga telah dijabarkan dalam program prioritas pada periode renstra 2025-2029 yang diuraikan pada tabel 4.4. dibawah ini. Sedangkan Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 4.5 dan 4.6 berikut ini

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
			Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P3AP2KB	Poin	91.16	93.16	94.16	95.16	94.16	97.16	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0.1928	0.1926	0.1924	0.1922	0.1920	0.1918	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	67.410	67.430	67.450	67.470	67.490	67.510	
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persentase	7.80%	7.75%	7.70%	7.65%	7.60%	7.58%	
5	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	95.74	95.76	95.78	95.80	95.82	95.84	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0.1928	0.1926	0.1924	0.1922	0.1920	0.1918	
3	Persentase ARG Daerah	Persentase	11.93	12.20	12.50	12.70	12.90	13.00	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentase	7.80	7.75	7.70	7.65	7.60	7.58	
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persentase	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
7	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	81.58	81.65	81.70	81.75	81.80	82	
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persentase	11.10	10.90	10.80	10.70	10.60	10.50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persentase	18.73	17.84	16.96	16.07	14.30	8.87	
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	68.2	68.66	69.12	69.57	70.03	70.49	

BAB V
PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penyusunan "Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025-2029" dapat terselesaikan. Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Perangkat Daerah lima tahun sebelumnya, dimana keberhasilan pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penyusunan Renstra di tahun mendatang

5.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tahun 2025-2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD